

MODERNISASI DI KARESIDENAN TERNATE 1900-1942

Jainul Yusup, S.S., M.Hum.

Abstract

Modernization is a historical phenomena that is rarely discussed. On the contrary it is actually important historically phenomenon. Modernization implies on changing in social pattern and behavior which encourage to values changing. It was happened for modernization in Ternate Residency. Modernization changes various traditional social pattern and it had been foundation for modern Indonesia. Ternate's early modernization consist of political and economy modernization. Colonial government's centralization of politic and economic authority replace slowly traditional economically evolution to involve on global rapidly market. Colonial period in 1900-1942 is the begining for Indonesia's changing.

Keywords: Modernization, economy, politic

PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Terminologi modernisasi sendiri setidaknya memiliki makna beragam entah merupakan bagian dari filsafat kritis yang memaknainya sebagai rasionalitas ataupun bagian dari westernisasi yang mengikutiproses pembaratan terutama di dunia non Eropa. Akan tetapi, modernisasi sendiri membawa banyak pengaruh kepada sistem nilai dan praktis pada masyarakat non Eropa itu sendiri. Berbagai bentuk perubahan itu sendiri rupanya memiliki pengaruh mendalam bagi masyarakat non Eropa, bahkan hingga saat ini..

Artikel ini akan mengulas modernisasi yang terjadi di Maluku Utara pada periode colonial. Hal terpenting yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana periode kolonial mampu membawa transformasi khususnya pada perubahan dari tradisionalitas kepada bentuk westernisasi. Peran politik dan kekuasaan memang tidak dapat diabaikan. Artikel ini akan mencari jawaban atas beberapa hal. Salah satunya adalah proses modernisasi secara ringkas. Hal ini tentunya disebabkan berbagai faktor kausalitas atau sebab akibat yang menyebabkan fenomena modernisasi di masa lalu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana implikasi atau dampak dari proses modernisasi itu sendiri.

KERANGKA TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi, meskipun kecepatan dan arah perubahannya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya. masyarakat yang

lain. Proses modernisasi itu sangat luas, dan tidak bisa dibatasi ruang lingkup dan masalahnya. Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritis modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam tiga cara: historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan *westernisasi* atau *Amerikanisasi*. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap moderen baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis berciri lebih khusus dari pada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat moderen dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra moderen. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Modernisasi hampir pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat. Apalagi modernisasi mulai menyangkut nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat. Proses yang begitu cepat serta tidak mengenal istirahat hanya dapat menyebabkan disorganisasi yang terus menerus, karena masyarakat tidak pernah sempat untuk mengadakan reorganisasi. Salah satu faktor psikologi-sosial yang penting bagi modernisasi adalah komitmen rakyat atau sekurang-kurangnya keinginan mereka untuk menjadi moderen, karena itulah sebagian besar waktu dan tenaga pemimpin politik dicurahkan untuk menjamin dan memantapkan komitmen atau keinginan rakyat ini.

Guna mendukung penelitian ini sendiri berbagai referensi ilmiah diperlukan. Beberapa sumber yang diketahui pada umumnya masih berupa data-data yang tersebar pada berbagai literatur sejaman. Hal ini memungkinkannya untuk digunakan sebagai sumber data. Meskipun demikian beberapa tema mengenai modernisasi khususnya pada periode kolonial dapat dijadikan acuan guna melihat sejauh manakah komparasi modernisasi khususnya pada periode kolonial di berbagai daerah Indonesia.

Salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah hasil penelitian Prof. Djoko Soekiman yang berjudul *Kebudayaan Indis; Dari Jaman Kompeni Sampai Revolusi*.³ Karya yang mengulas secara luas mengenai sejarah kebudayaan dan mentalitas pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan menggambarkan secara general bagaimana perubahan terjadi pada prilaku dan nilai-nilai baru di antara masyarakat Indies atau

³ Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis; Dari Jaman Kompeni Sampai Revolusi*, Depok: Komunitas Bambu, 2011.

Indonesia.

Karya lainnya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah kumpulantulisan karya Howard Dick, et.al. yang berjudul *Emergence of National Economy, An Economic History of Indonesia 1800-2000*.⁴ Buku ini menjelaskan tentang berbagai hal mengenai bagaimana ekonomi kolonial yang berupaya untuk menciptakan suatu sistem ekonomi nasional yang terintegrasi sebagaimana sistem ekonomi pada negara barat mempengaruhi berbagai sektor konsumsi dan produksi masyarakat.

⁴ Howard Dick, et.al. *Emergence of Nationa Economy; An Economic History of Indonesia 1800-2000*. Melbourne: ANU, 2000.

Berbagai karya lainnya yang menjadi rujukan pustaka dalam penelitian ini adalah referensi seaman dari periode penelitian. Beberapa karya seperti F. S. A. De Clercq, Frans Husken, J.M. Baretta, W. Van de Wall, dan G. J. Ellen memberi gambaran mengenai perubahan sebagai dampak modernisasi dan westernisasi yang terjadi di Karesidenan Ternate. Selain itu karya-karya kontemporer yang mengkaji wilayah Maluku Utara seperti karya C.F. van Fraassen, Jaap Keppel, Leontine Visser, Dick Teljeur, dan Lanny Prabowo memberi informasi mengenai berbagai perubahan di Ternate berkenaan dengan modernisasi baik yang bersifat sinkronik maupun diakronik.

KONDISI SOSIAL DAN DEMOGRAFIS KARESIDENAN TERNATE

Karesidenan Ternate merupakan suatu ruang yang bersifat politis. Penggunaan istilah karesidenan dilekatkan kepada unsur kekuasaan pemerintah kolonial. Pemberian batas-batas ruang politik mencakup latar belakang geografis. Wilayah geopolitis Maluku Utara dibentuk tahun 1824 melalui pendirian Karesidenan Ternate oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Pada mulanya Maluku Utara merupakan bagian dari *Gouvernement* Maluku yang berpusat di Ambon. Wilayah karesidenan pada masa tersebut terdiri dari tiga wilayah kesultanan di Maluku, yaitu Ternate, Tidore dan Bacan yang sejak abad ke-17 telah menjadi vasal VOC, dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1818.¹

Penghapusan *Gouvernement* Maluku di tahun 1861 menyebabkan perubahan wilayah administratif Maluku Utara. Pemerintah kolonial memisahkan wilayah Manado, Kepulauan Sangir-Talaut dan Gorontalo untuk kemudian dibentuk menjadi Karesidenan Manado yang berdiri sendiri. Penciutan wilayah Maluku Utara disusul dengan pemisahan daerah Kepulauan Banggai dan Tombungku di tahun 1907 yang digabungkan ke dalam *Gouvernement Celebes en Onderhorigheden*, dan seluruh Pulau Nieuw Guinea Barat dan pulau-pulau di sekitarnya yang dipisahkan pada tahun 1911 dan kemudian digabungkan dalam Karesidenan Ambon.²

Wilayah-wilayah tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok geografis. Pertama, pengelompokan akan digabungkan pada Kelompok Pulau Halmahera dan Morotai dengan pulau-pulau di sekelilingnya, yang terdiri Kepulauan Loloda Utara & Selatan (barat laut Pulau Halmahera); kelompok pulau-pulau di bagian selatan Halmahera.

Pengelompokan kedua berkenaan dengan kelompok pulau-pulau di pantai barat Halmahera, yang terdiri dari pulau-pulau Mayo, Tifore, Hiri, Ternate, Maitara, Tidore,

¹ Françoise Valentijn, *Beschryving der Moluccos, Eerste Deel* (Dordrecht dan Amsterdam: Johannes van Braam en Gerard Onder de Linden, 1724), hlm. 102, 152, 352; Leonard Y. Andaya, *The World of Maluku, Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 177, 190.

² Valentijn, *op.cit.*, hlm. 21; A. B. Lapijan, "Kata pengantar" dalam ANRI, *Ternate: MvO J. H. Tobias (1857) dan C. Bosscher (1859)*, (Jakarta: ANRI, 1980), hlm. 2.

Mare, Moti, Makian. Kemudian pengelompokan ketiga berkenaan dengan Kelompok Bacan (selatan Halmahera), termasuk di antaranya ialah Kepulauan Bacan, Kepulauan Obi, Pulau Manjoli, Pulau Tawale Kecil, Pulau Kasiruta serta Kepulauan Lata-Lata; Kelompok Kayoa (barat daya Halmahera), yang di dalamnya terdapat Kepulauan Gura Ici, Pulau Kasiruta, dll. Terakhir adalah Kelompok Kepulauan Sulabesi (atau yang kemudian hanya dikenal dengan nama Kepulauan Sula), yang terdiri dari pulau-pulau Sula, Taliabu, Mangoli, Lifamatula dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya.

Topografi pulau-pulau itu memiliki banyak keragaman. Pada umumnya daratannya merupakan daratan gunung api muda yang masih aktif. Selain itu keadaannya sangat bergunung-bergunung sehingga tanah datar yang luas sangat terbatas.³ Iklim di Maluku Utara ialah tropis karena letaknya di lintasan garis khatulistiwa. Hal tersebut berpengaruh pada temperatur udara yang umumnya tinggi dan teratur (perubahan antara titik tertinggi dan terendah tidak berarti).⁴

Sebelum membahas permasalahan sosial lebih jauh, terlebih dahulu akan dilakukan peninjauan pada kondisi demografis di Maluku Utara. Hal ini sangat berguna bagi pengetahuan mengenai jumlah penduduk di Maluku Utara. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Maluku Utara pada kurun periode 1900-1942 secara tepat tentunya tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan sensus penduduk pertama baru dilakukan di Pulau Halmahera pada tahun 1915, dan kemudian disusul di Kepulauan Sula tahun 1917. Keakuratan data yang diperoleh itupun masih jauh dari sempurna karena metode pengambilan data hanya didasarkan atas informasi kepala-kepala kampung sehingga menyebabkan jumlah penduduk hanya bersifat perkiraan. Mengenai sensus tahun 1915, Baretta menyatakan bahwa, “Jumlah warga negara Ternate dan Tidore seluruhnya berdasarkan kabar angin. Perkiraannya bahkan tidak memiliki nilai relatif, yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah atau seluruhnya tak berdasar. Karena pemerintahan swapraja (*zelfbestuur*) telah dijamin melalui kontrak pada para penguasa ini, memperoleh angka yang lebih akurat tidak ada gunannya bagi pemerintah kita dan bahkan jika kita turut campur. Sebagian besar kepala distrik dan kampung tidak akan mampu mengumpulkan angka yang lebih akurat sesuai keinginan kita.”⁵

Jumlah penduduk di Maluku Utara mengalami peningkatan seiring menguatnya peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini sesuai dengan jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 1912 dan 1917 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2.

³ ANRI, MvO Residen E. Verbeke 1917; “Gegevens betreffende Halmahera en Morotai” dalam *Adatrechtbundels XXI*, (‘s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1922).

⁴ J.M. Baretta, *Halmahera en Morotai*, (Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1917), hlm. 4; Hubert Th. Th. M. Jacobs, S. J., *A Treatise on the Moluccas (c. 1544), Probably the Preliminary Version of the Antonio Galvao’s Lost Historia Das Molucas*, Edited, annotated, and translated into English from the Portuguese manuscript in the Archivo General de Indias, Seville by Hubert Th. Th. M. Jacobs, S. J., (Rome & St. Louis: Jesuit Historical Institute & St. Louis University, 1971), hlm. 37.

⁵ J. M. Baretta, *op.cit.*, hlm. 98; Hal ini juga diakui oleh Hans Gooszen, *A Demographic History of the Indonesian Archipelago, 1880-1942*, (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm. 21.

Jumlah Penduduk 1912-1917⁶

Daerah	Luas	Penduduk		Kepadatan	
		1912	1917	1912	1917
Maluku Utara dan daerah taklukannya (kecuali Nieuw Guinea)	48.500 km ²	160.135	170.000	3,3	3,5
Halmahera dan Morotai	± 20.000 km ²	–	±60.000	–	3
Nieuw Guinea utara	± 150.000 km ²	± 40.000	± 42.000	–	0,3
Buitenbezittingen	1.376.000 km ²	11.845.179	12.400.000	8,60	9

Sb. Baretta, *op.cit.*, hal. 89.

Jumlah ini juga sesuai dengan laporan K. A. James pada tahun 1918. James memperkirakan bahwa penduduk di Halmahera sekitar 60.000 jiwa, kemudian di Pulau Ternate dan Hiri sekitar 13.200 jiwa, Tidore dan kepulauan sekitarnya sekitar 25.800 jiwa, Kepulauan Bacan dan Obi sekitar 8.500 jiwa, Kepulauan Sula sekitar 15.200 jiwa.

Penggolongan sosial di Maluku Utara terbagi menjadi dua bagian, yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat asing atau pendatang. Tiap-tiap golongan dikenakan hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berbeda. Di satu sisi golongan penduduk pribumi dikategorikan sebagai warga kesultanan (*zelfsbestuur* atau *sultan onderdanen*) dan dikenakan sistem hukum berdasarkan kekuasaan kesultanan, di sisi lainnya golongan masyarakat pendatang dikategorikan sebagai warga pemerintah (*gouvernement onderdanen*) dan dikenakan sistem hukum berdasarkan hukum kolonial.

MODERNISASI EKONOMI DAN POLITIK DI KARESIDENAN TERNATE

Modernisasi yang terjadi Pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik pemerintah kolonial ditandai melalui pendirian ruang geopolitik Maluku Utara di tahun 1866 yang ditandai melalui Karesidenan Ternate. Periode ini menunjukkan kian besarnya keterlibatan pemerintah kolonial dalam proses pengambilalihan kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan publik di Maluku Utara. Oleh karena itu hal merupakan

⁶ MvO K. A. James 1918.

tonggak kolonialisme Eropa di wilayah yang termasuk di dalamnya.⁷ Indikasi tersebut telah tampak dari masa sebelum 1866. Kegagalan pemerintahan orang Belanda dalam menanggulangi perlawanan Sultan Nuku.

Pada mulanya ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi pada masa pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1860 yaitu pembukaan pelabuhan bebas pada tahun 1842, penghapusan pelayaran hongkong pada tahun 1850, dan penghapusan perbudakan yang dimulai pada tahun 1860.⁸ Ketiga kebijakan tersebut memiliki faktor penyebab dan dampaknya masing-masing.

Pada kebijakan pertama yaitu pembukaan pelabuhan bebas, yang setengah hati, tampaknya merupakan sebuah upaya untuk menghancurkan jaringan perdagangan lokal yang masih eksis dan tidak berada dalam kontrol Belanda.⁹ Meskipun tujuan utama dari usaha ini tidak berhasil, setidaknya hal tersebut mampu menghidupkan geliat perdagangan di Maluku terutama pelabuhan Ternate di dalam kontrol pemerintah.

Kebijakan kedua adalah penghapusan pelayaran Hongkong yang berpengaruh terhadap hubungan kekuasaan Kesultanan Ternate dan Tidore.¹⁰ Ekspedisi ini sesungguhnya merupakan ekspedisi penghukuman melalui penyerangan dan perampasan. Salah satu hal penting bahwa seringkali sultan tidak perlu membiayai secara teratur pasukan bersenjata karena melalui ekspedisi semacam ini para prajurit termotivasi untuk melakukan perampokan desa-desa sasaran yang kadangkala membawa keuntungan jauh lebih besar daripada upah ataupun biaya yang ditawarkan sultan.¹¹

Kebijakan terakhir, yang terpenting dan paling berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dan politik kesultanan, adalah penghapusan perbudakan. Penghapusan perbudakan merubah sistem produksi dan tatanan sosial di dalam institusi dan kehidupan sosial kesultanan. Selain itu penghapusan perbudakan juga menutup adanya jaringan perdagangan budak yang banyak melibatkan kaum bangsawan dalam penyediaan sumber ekonomi mereka.¹²

Penutupan akses-akses ekonomi tersebut menyebabkan banyak di antara elit-elit politik kehilangan sumber pendapatan dan jatuh miskin. Selain itu untuk bertahan dari tekanan ekonomi kolonial, kekuasaan kesultanan beserta institusinya terpaksa hanya bergantung pada pemasukan upeti tradisional mereka terutama dari wilayah-wilayah yang mudah dijangkau. Kondisi tersebut menimbulkan penindasan dan penyelewengan jabatan di setiap penjurur karesidenan sehingga mengakibatkan ketersediaan massa yang dapat

⁷ KV 1868-9, hlm. 26.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Baretta, *op.cit.*, hlm. 40, 64; De Clercq, *op.cit.*, hlm. 113; ANRI, *op.cit.*, hlm. 180, 186; M. Adnan Amal & Irza Arnyta Djafaar, *Maluku Utara, Perjalanan Sejarah 1800-1950 Jilid 2*, (Ternate: Universitas Khairun, 2003) hlm. 65; J. Thomas Lindblad, "The outer islands in the 19th century: contest for periphery" dalam Howard Dick, et.al., *The Emergence of A National Economy, An Economic History of Indonesia, 1800-2000*, (Crows News & Honolulu: Allen&Unwin & University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 82.

¹⁰ Ch. F. van Fraassen, "Ternate and its dependencies" dalam L. E. Visser ed., *op.cit.*, hlm. 30.

¹¹ Ch. F. van Fraassen, *Ternate, op.cit.*, hlm. 30; ANRI, *op.cit.*, hlm. 178.

¹² Fraassen, *Deel I, op.cit.*, hlm. 249.

dengan mudah dimobilisasi untuk sebuah gerakan massa yang bertujuan perubahan di paruh terakhir abad ke-18.¹³

Pecahnya gerakan perlawanan Dano Hasan yang tidak dapat ditanggulangi oleh penguasa lokal sesungguhnya merupakan dampak kegoncangan sosial di Maluku Utara. Penindasan gerakan ini oleh pemerintah membawa konsekuensi pada intervensi pemerintah yang kian dalam melalui enyragaman sistem kenegaraan terkait dengan wilayah Maluku Utara. Hal ini merupakan hal yang pertama kali terjadi di Maluku Utara.

Dampak dari peristiwa Dano Hasan adalah pemberlakuan kontrak politik pada tahun 1880 yang menegaskan pengakuan seluruh kesultanan di Maluku Utara atas hak pemerintah kolonial untuk mengangkat atau memberhentikan semua bangsawan, pejabat dan perwira di dalam institusi Kesultanan. Selain itu diakui pula bahwa pemerintah kolonial memiliki hak untuk menggabungkan suatu daerah kesultanan ke dalam daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah kolonial dalam kurun waktu setiap saat.¹⁴ Kontrak ini dilandasi oleh semangat sebagaimana yang disampaikan oleh Baretta bahwa, "Prinsip utama, berdasarkan kontrak dengan raja Ternate dan Tidore adalah adanya ketergantungan mutlak kepada Pemerintah Hindia Belanda, disertai dengan campur tangan penguasa tertinggi pribumi dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang seminimal mungkin."¹⁵

Pemberlakuan kontrak pada tahun 1880 merupakan awal keterlibatan langsung pemerintah kolonial dalam seluruh bidang kehidupan di Maluku Utara. Dari sisi ekonomi, keterlibatan ini memunculkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berdampak luas pada kehidupan sosial di Maluku Utara. Sehubungan dengan pemusatan kekuasaan ekonomi kolonial ada empat kebijakan penting berkaitan dengan bidang ekonomi. Keempat kebijakan tersebut adalah monetisasi pajak, penghapusan kerja wajib untuk kesultanan, pengambilalihan pelabuhan Ternate, dan pembentukan kas kesultanan.

Kebijakan pertama, yaitu monetisasi pajak, merupakan hal terpenting dalam pengikisan sumber ekonomi politik kesultanan. Pergantian sistem upeti kepada pajak individu dalam bentuk uang dimulai sejak tahun 1880 dan perluasannya kian intensif pada tahun 1885. Oleh karena banyak muncul hambatan dalam penerapan penarikan dan pemanfaatan pajak, pada tahun 1905 pemerintah membentuk komisi pemerintahan yang

¹³ KV 1877, hlm. 28 M. Adnan Amal, *op.cit.*, hlm. 65; Daerah Papua, Hlmmahera Tidore (bagian timur) atau *Gamrange* dan Raja Ampat adalah para perompak dan bajak laut yang banyak menghasilkan budak.

¹⁴ Hal ini juga diiringi dengan pengangkatan beberapa pengangkatan pejabat wilayah seperti pengangkat seorang *posthouder* di Sanana (ibukota distrik dari Kepulauan Sula), Tobelo dan Kau yang bertugas bukan hanya sebagai pengawas dari pemerintahan pribumi, yang biasanya dipimpin oleh seorang Salahakan atau Sangaji, tetapi seringkali sebagai pengambil keputusan atau pemberi perintah terhadap penguasa pribumi. KV 1883-84, hlm. 20; D. G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, (s' Gravenhage: Martinus Nijhoff), hlm. 420.

¹⁵ *Staatsblad* No. 72, th. 1878; Baretta, *op.cit.*, hlm. 46.

membawa perluasan pajak secara sistematis dan penghentian segala bentuk upeti terhadap kesultanan.¹⁶

Selain monetisasi pajak, kebijakan lainnya yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian di Maluku Utara adalah penghapusan beberapa kewajiban kerja paksa bagi para kawula Sultan.¹⁷ Penghapusan yang dilaksanakan pada 1880 ini kian efektif sejak tahun 1892 dengan diberlakukannya *herendiensten* (kerja wajib) bagi kepentingan pemerintah. Pada mulanya *herendiensten*, yang menjadi tanggung jawab dari kawula pemerintah yang tinggal di ibukota Ternate dan Labuha, diaplikasikan dalam bentuk penjagaan atau *kerja gardu* untuk keamanan umum. Setiap pekerja diwajibkan melakukan penjagaan selama 12 hari per tahun. Akan tetapi dengan hilangnya kerja paksa di kesultanan menyebabkan para warga sultan perlahan-lahan mulai dikenakan peraturan kerja wajib untuk pelayanan daerahnya masing-masing. Jenis pekerjaan yang dikenakan adalah pemeliharaan keamanan desa, jalan dan jembatan.¹⁸

Kebijakan ketiga ialah pengambilalihan hak pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1882 melalui penghapusan pajak *leo-leo* di Kesultanan Ternate.¹⁹ Sejak tahun 1902, melalui *Besluit* No. 10, tanggal 11 Juli 1902 pengelolaan pelabuhan Ternate sepenuhnya dialihkan

¹⁶ Pada saat ini juga daerah Maba dan Weda dipisahkan dari Kesultanan Tidore dan membentuk *Onderafdeeling* Weda, MvO Residen W. G. Roos 1909; KV 1905, hlm. 111; KV 1908, hlm. 69.

¹⁷ Kondisi ini diuntungkan dengan adanya epidemi cacar pada tahun 1884, yang memungkinkannya administrasi kolonial dapat menjangkau hingga ke pedalaman. KV 1885-86, hlm. 26.

¹⁸ MvO W. G. Roos 1909, reel MvO 2e No. 27. Para kawula sultan demi kepentingan raja-raja dan para bangsawan melakukan kerja rumah tangga atau *pinontol*. Apabila seorang kawula ingin meninggalkan kewarganegaraannya dan bergabung dengan kesultanan lainnya maka ia harus membayar *f.* 25. Banyak orang Ternate kemudian memanfaatkan ini dengan mencari burung di Papua yang kemudian menjadi warga dari Tidore karena kerja pelayanan di Kesultanan Tidore jauh lebih ringan. D. G. Stibbe, *op.cit.*, hlm. 421; KV 1893-94, hlm. 28;

¹⁹ Pada tahun yang sama dengan penghapusan pajak ini, telah diputuskan suatu kontrak antara pemerintah kolonial dengan KPM dan *Nederlandsch-Indie Stoomvaartmaatschappij* bahwa sejak pemberlakuan *gouvernementbesluit* 21 April 1882, terutama pada pasal 9 menyatakan bahwa Ternate merupakan daerah terbuka bagi pelayaran kapal api. Khusus bagi *Nederlandsch-Indie Stoomvaartmaatschappij* merupakan perusahaan pelayaran yang rute ke Hindia bagian Timur termasuk Ternate. Bahkan sejak tahun 1884 subsidi dilipatgandakan karena kerugian yang diderita pada jalur ini. T. H. Der Kinderen, "Verslag betreffende de invoering van de nieuwe regelingen van het rechtwezen in de gewesten Celebes en onderhoorigheden, Timor, Menado, Amboina, en Ternate" dalam KV 1883-84, Bijl. H; "Overzicht betreffende de ten laste van Nedelandsch-Indie gesubsidieerde stoompaketaarddiensten der Nederlandsch-Indische stoomvaartmaatschappij, op 1 Mei 1883" dalam KV 1883-84, Bijl. R; KV 1884, hlm. 23; KV 1884/1885, hlm. 23.

kepada pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk memungut bea dan cukai ekspor impor serta pajak berlabuh dan uang pelabuhan serta mengelola pelabuhan dan keamanan pelabuhan di seluruh wilayah Maluku Utara.²⁰

Kebijakan terakhir adalah pembentukan dan pemberlakuan kas daerah atau kerajaan pada tahun 1908.²¹ Kas daerah berfungsi untuk memisahkan anggaran kesultanan sebagai suatu wilayah administratif dan rumah tangga istana. Pelaksanaan kebijakan ini disertai dengan penciptaan wilayah administratif kesultanan sehingga hanya terbatas pada daerah-daerah sekitar istana yaitu Ternate, Tidore dan Bacan. Anggaran daerah lainnya, terutama Halmahera dimasukkan ke dalam kas karesidenan, dimana residen merupakan pemegang tanggung jawab atas penggunaan anggaran kas tersebut.²²

Pendapatan kesultanan melalui pemasukan pajak, dll., dimasukkan ke dalam kas kerajaan. Hal tersebut berguna untuk mengatur seluruh urusan kenegaraan termasuk pendapatan sultan.²³ Penyempurnaan pengaturan kas daerah oleh pemerintah kolonial terjadi pada tahun 1915 sehingga seluruh keputusan yang berkaitan dengan penggunaan kas wilayah ditangani langsung oleh residen, dan sultan tidak memiliki hak untuk menggunakan anggaran tanpa persetujuan residen terlebih dahulu.

Keempat kebijakan di atas merupakan upaya pemerintah kolonial untuk menguasai kehidupan ekonomi dan politik di wilayah Maluku Utara. Pada mulanya Kesultanan Ternate berupaya menolak setiap perubahan pada kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Hal ini dapat dilihat dari penolakan penghapusan pajak dan kerja wajib di Kesultanan Ternate, meskipun tujuan akhir pajak jatuh kepada kesultanan itu sendiri. Ada tiga alasan penting mengenai penolakan ini.

Pertama, adalah turunnya pemasukan kesultanan akibat rendahnya nilai pajak. Meskipun sebelumnya upeti *in natura* lebih didasarkan atas pajak komunal, nilai-nilai barang yang disetorkan sebagai pajak memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada hasil pajak uang karena tingginya nilai barang-barang upeti sebagai komoditi ekspor atau berfungsi secara praktis pada kebutuhan pragmatis kesultanan. Alasan kedua adalah ketidakcocokan pajak individu pada kehidupan sosial di Maluku Utara. Penyebaran penduduk dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh penjuru karesidenan mempersulit pengumpulan seluruh pajak. Terakhir, yang terpenting, ialah terancamnya legitimasi

²⁰ KV 1903 hlm. 152; D.G. Stibbe, *op.cit.*, hlm. 420.

²¹ Hal ini juga berjalan beriringan dengan apa yang terjadi pada tahun 1903 mengenai pembentukan desentralisasi dimana sejak masa ini intensifikasi administrasi pemerintahan Hindia Belanda pada pemerintah pribumi semakin kuat. Amy van den Bosch, 1941, *The Dutch East Indies* (Los Angeles: University of California), hlm. 137.

²² KV 1909, hlm. 78.

²³ Pendapatan sultan pada kurun periode ini adalah *recognitie peningen* (uang ganti rugi) sebesar f. 12.000 Rds., sebagai ganti rugi dari ekstirpasi rempah-rempah. Selain itu adapula subsidi-subsidi bagi kesultanan dan jabatan-jabatan penting yang tetap dipertahankan. *Ternate: MvO J. H. Tobias dan C. Bosscher*, (Jakarta: ANRI, 1980), hlm. 168.

kesultanan karena banyak di antara warganya merasa menjadi warga pemerintah yang telah umum dikenal melakukan pembayaran pajak individu dalam bentuk uang.²⁴

Ketiga alasan tersebut menjadi sebab munculnya rentetan kekacauan. Penentang utamanya ialah Kesultanan Ternate. Ia didukung oleh orang Muslim, khususnya yang terkait dengan Kesultanan Ternate karena dalam beberapa hal pelayanan dan kedudukan istimewa para pemimpin dan masyarakat Islam dihilangkan dan kondisi sosial berubah menjadi suatu kondisi yang egaliter.²⁵ Mereka berupaya mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Hal ini tampak pada banyak di antara para aparat Kesultanan Ternate yang masih melakukan pungutan pajak dan hak pelayanan tradisional hingga tahun 1906.²⁶

Goncangnya tatanan sosial kesultanan berdampak pada kemunculan penyebaran dan puritanisasi agama Islam oleh pihak kesultanan dalam rangka menjaga loyalitas warganya dan legitimasi kekuasaan sultan sebagai pemimpin umat Islam.²⁷ Kondisi ini tentunya membuat pemerintah kolonial gusar karena dengan adanya perluasan agama Islam di kalangan orang Alfur, maka kepentingan politik pemerintah akan terganggu. Belum lagi usaha *zending* yang tidak mengalami kemajuan akibat hambatan dari pesaingnya di pihak kesultanan yang senantiasa menghalang-halangi mereka.²⁸

Puncak dari seluruh peristiwa ini adalah pembunuhan Kontrolir Jailolo, Letnan Aggerbeek, pada tahun 1914 oleh gerombolan penyerang yang berasal dari Tobelo, dan berdampak pada penangkapan dan pembuangan Sultan Usman ke Bandung pada tahun 1915 karena dianggap memiliki keterlibatan di baliknya. Kekosongan jabatan sultan di Kesultanan Ternate mengikuti jejak Kesultanan Tidore yang tidak memiliki sultan sejak 1905. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah kolonial merupakan satu-satunya

²⁴ De Clercq, *op.cit.*, hlm. 66, 105-6; MvO Residen W. G. Roos 1909, reel MvO 2e No. 27.

²⁵ Kondisi ini dapat dilihat pada apa yang terjadi pada orang Kau Islam yang tidak mau disetarakan dengan tetangganya orang Kau Alfur dan Tobaru, dan tetangga di sebelah utara yaitu orang Tobelo, yang dianggap oleh mereka lebih primitif. Selain itu ada pula kasus mengenai tindakan sewenang-wenang seorang sangaji terhadap penduduk Galela Alfur pada tahun 1906 menyebabkan penyerangan orang Galela Alfur pada sangaji tersebut. Pemerintah kolonial segera mengganti sangaji tersebut dengan tokoh-tokoh adat Galela. Hal ini membuat orang Islam Ternate marah karena tradisi kepemimpinan Islam telah dilanggar dan penarikan pajak pada Alfur telah dialihkan kepada tokoh dan desa Galela Alfur tersebut. De Clercq, *op.cit.*, hlm. 106.

²⁶ Pada beberapa aparat Kesultanan, terutama di daerah, juga terjadi beberapa permasalahan dalam hlm loyalitas terhadap Sultan Ternate. Kebebasan ini seperti yang ditunjukkan oleh Sangaji Makian di Ngofakiaha, yang justru lebih memilih kedekatannya dengan para kontrolir Belanda daripada kesultanan. ANRI, Missive Kontrolir Makian tertanggal 11 Februari 1884, No. 310, 311, Arsip Ternate No. 216.

²⁷ Upaya ini juga didukung oleh para pedagang Arab yang berada di Ternate. KV 1885-86, hlm. 26.

²⁸ KV 1883-84, hlm. 19; KV 1884-1885, hlm. 24; KV 1889, hlm. 21.

kekuasaan yang eksis karena Kesultanan Bacan, yang masih memiliki sarana kekuasaan yang lengkap, bukan merupakan ancaman serius bagi pemerintah.²⁹

KESIMPULAN

Modernisasi di Maluku Utara merupakan hal yang terbantahkan. Kondisi ini merupakan bagian dan fondasi dari berbagai perubahan yang ada. Beberapa bentuk modernisasi adalah bidang politik dan ekonomi. Modernisasi di bidang politik mencakup bagaimana perubahan sistem politik dari tradisional kepada kolonial, sedangkan modernisasi di bidang ekonomi adalah bagaimana perubahan di bidang sosial politik pada masyarakat.

Bentuk modernisasi di bidang ekonomi adalah monetisasi pajak, penghapusan kerja wajib untuk kesultanan, pengambilalihan pelabuhan Ternate, dan pembentukan kas kesultanan. Monetisasi pajak berkenaan dengan bagaimana pemberlakuan uang Belanda guna menekankan pentingnya sistem moneter Belanda.

Hal lainnya adalah penghapusan kerja wajib kesultanan. Hal ini berguna bagi pergeseran orientasi politik kepada pemerintah kolonial agar adanya peningkatan orientasi keuangan kepada pemerintah kolonial. Selain itu, penghapusan kerja wajib bermanfaat agar terciptanya suatu sistem monopolitik dimana dominasi kolonial akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Hal berikutnya adalah pembentukan kas kesultanan yang sangat bermanfaat bagi pemberlakuan kontrol ekonomi bagi masyarakat. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah kolonial mengatur langsung dalam sistem keuangan kesultanan. Hal ini tentunya terjadi pada kondisi keuangan sehari-hari. Hal serupa juga terjadi pada pengambilalihan pelabuhan Ternate yang dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam sistem pemasukan dan keuangan kesultanan.

DAFTAR PUSTAKA

- MvO Residen W. G. Roos 1909
MvO Residen E. Verbeke 1917
MvO K. A. James 1918.
MvO Residen B. J. Haga 1937
Staatsblad No. 72, th. 1878
Staatsblad no. 33, tanggal 6 Februari 1882.

²⁹ Sesungguhnya proses pemusatan kekuasaan kolonial mulai berlangsung sejak tahun 1882, terutama pada Kesultanan Ternate dimana melalui *Indisch Staatsblad* No. 33, tanggal 6 Februari 1882, didirikan suatu dewan kerajaan dimana pemerintah kolonial termasuk di dalamnya. KV 1883-84, Bijlage H, hlm. 1-6; KV 1910, hlm 53-4.

Bundel Ternate No. 216, *Opgave van aangekomen en vertrokken schepen en vaartuigen te Ternate 1867*

Missive Controleur Makian tertanggal 11 Februari 1884, No. 310.

Missive Controleur Makian tertanggal 11 Februari 1884, No. 311..

Bundel Ternate No. 287, *Onderhoud van prahoe en cultuur*

Rapport Controleur Bacan, Laboeha 12 Februari 1889, No. 34.

Rapport Controleur Batjan, Johan Stormer 1891.

Missive Controleur Batjan, Johan Stormer, No. 50, tertanggal 29 Januari 1891.

Rapport Controleur Batjan 12 Maret 1883, Arsip Ternate No. 287.

Missive Kontrolir Batjan, April 1883, Arsip Ternate No. 287.

Bundel Ternate No. 321-324, *Sura-menyurat Residen Ternate, 1898.*

Rapport Residen Ternate No. 489, tertanggal 4 Juli 1890, Arsip Ternate No. 321.

Missive Sim Moei, Tja Khai Ang dan Tan Sim Tang pada Residen Ternate secara berturut-turut tertanggal 24, 22, dan 21 Januari 1884.

Bundel Ternate No. 337, *Agenda Landbouw en vetelt, 1892.*

Missive Departement Binnenlandsch Bestuur No. 2405, 19 Mei 1889.

Verklaring, Batjan 18 Juli 1891.

Bundel Ternate No. 360, *Landbouw Concessue, 1894.*

Missive Departement van Binnenlandsch Bestuur No. 1033, Batavia 17 Februari 1893.

Extract uit het Register dere Besluiten van den Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie, No. 15, 21 September 1899.

Laporan pemerintah yang diterbitkan

Koloniaal Verslag 1860-1861, 1862, 1865, 1868-1869, 1869-1870, 1872, 1875-1876, 1876-1877, 1877, 1880, 1880-1881, 1882, 1882-1883, 1883, 1883-1884, 1884, 1884-1885, 1885-1886, 1886, 1886-1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1893-1894, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899-1900, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1916, 1917, 1918.

Adatrechtbundels XXI, 1922; Adatrechtbundels XXXIII, 1930; Adatrechtbundels XLL, 1940.

Hulstijn, P. 1918. *Soela Eilanden*. Weltevreden: N.V. Boekhandel Visser & Co.

Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuur. 1931. *Zelfsbestuurverorderingen Gouvernement der Molukken*, Seri A No. 12. Weltevreden: Landsdrukkerij.

ANRI. 1980. *Ternate: MvO J. H. Tobias (1857) dan C. Bosscher (1859)*. Jakarta: ANRI.

Buku dan Jurnal

Aa, Robide van der. "Rapport over Tidoreesch-Halmahera" dalam *BKI* 237 Deel 19 1872..

- Alex J. Ulaen. 2004. *Nusa Utara, Dari Perbatasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Andaya, Leonard Y. "Local trade networks in Maluku in the 16th, 17th, dan 18th centuries" dalam *Cakalele, Maluku Research Journal*, Vol. 2, No. 2, 1991.
- _____. 1993. *The World of Maluku, Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Baker, James N. 1994. "Ancestral traditions and state categories in Tidorese village society" dalam L. E. Visser ed. *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV.
- Baretta, J. M., 1917, *Halmahera en Morotai*, Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- Barraud, C. & J. Platenkamp, "Rituals and the comparison of societies" dalam *BKI, Rituals and Socio-Cosmic Order in Eastern Indonesian Societies, Part II Maluku*, No. 146, 1990, Leiden.
- Bellwood, Peter. 1978. *Man's Conquest of the Pacific, The Prehistory of South-east Asia*. Auckland: Williams Collins Publishers.
- _____. "Austronesian prehistory in Southeast Asia: homeland, expansion and transformation" dalam Peter Bellwood, James J. Fox and Darrell Tryon, ed. 1995. *The Austronesians, Historical and, Comparative Perspectives*. Canberra: ANU Press.
- Bellwood, Peter, James J. Fox and Darrell Tryon, "The Austronesians in history: common origins and diverse transformations" dalam Peter Bellwood, James J. Fox and Darrell Tryon, ed., 1995. *The Austronesians, Historical and, Comparative Perspectives*. Canberra, ANU Press, 1995.
- Bezemer, T. J. 1922. *Beknopte Encyclopaedia van Nederlandsh-Indie*. 's Gravenhage & Leiden: Martinus Nijhoff & N.V. E. J. Brill.
- Blust, R. "The linguistic value of the Wallace Line" dalam *BKI* 138, 1982, no: 2/3, Leiden.
- Boeke, J. H. 1983. *Prakapitalisme di Asia*, Penerjemah: D. Projosiswoyo. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bosch, Amy van den. 1941. *The Dutch East Indies*. Los Angeles: University of California.
- Cartesao, Antonio. 1944. *Suma Oriental, an account of the East, from red sea to Japan written in Mallaca & India in 1512-1515 and The Book of Francisco Rodrigues, Rutter of a voyage in the red sea, Nautical rules. Almanac & Maps, written & drawn in the east before 1515*. Translated from the Portuguese MS in the Bibliotheque de la chambre des depules, Paris & edited by Armando Cortesao. London: Printed for the Hakluyt Society.
- Clercq, F. S. A de. 1890. *Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate*. Leiden: E. J. Brill.

- Coolhaas, W. Ph. 1926. "Mededeelingen betreffende de Onderafdeeling Bacan" dalam *BKI* Deel 82. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Cowan, H. "Een taalkundig gegeven betreffende Misool." dalam *BKI* 110 (1954), no: 2.
- Crab, Paulus van der. 1878. "Geschiedenis van Ternate, in Ternataansche en Maleische tekst, beschreven door den Ternataan Naidah, met vertaling en aantekeningen door P. A. van der Crab" dalam *BKI*, 26, No. 2.
- _____. 1885. *Iets over het Rijk van Batjan*. Batavia: t.p.
- Crawfurd, John. 1820. *History Of The Indian Archipelago: Containing An Account Of The Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions And Commerce Of Its Inhabitants by John Crawfurd, F.R.S., Late British Resident At The Court Of The Sultan Of Java*, vol. 2. Edinburgh.
- Cushner, Nicholas P. 1971. *Spain in the Philippines, From Conquest to Revolution*, Manila: Ateneo de Manila University.
- Farida Maricar. "Penggunaan bahasa oleh masyarakat multilingual di Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara", Tesis S-2 Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2006.
- Fraassen, Ch. Van. 1987. *Ternate, De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia*, Deel I & II, Disertasi Universiteit Leiden.
- _____. 1994. "Ternate and its dependencies" dalam L. E. Visser ed., *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV.
- Gooszen, Hans. 1999. *A Demographic History of the Indonesian Archipelago, 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.
- Haryo S. Martodirjo. 1994. "Organisasi sosial Orang Tugutil di Halmahera" dalam Leontin E. Visser, ed. *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV.
- Houben, Vincent J. 2002. *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Terj.: E. Setyawati Alkhatab. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Indonesia Reisbibliotheek. 1991. *Irian Jaya, Nieuw Guinea*. Utrecht: Yellow Moon.
- Irza Arnyta Djafaar. 2006. *Jejak-Jejak Portugis di Maluku Utara*. Yogyakarta: Ombak.
- Jacobs, S. J., Hubert Th. Th. M. 1971. *A Treatise on the Moluccas (c. 1544), Probably the preliminary version of the Antonio Galvao's lost Historia Das Molucas*. Edited, annotated, and translated into English from the Portuguese manuscript in the Archivo General de Indias, Seville by Hubert Th. Th. M. Jacobs, S. J. Rome & St. Louis: Jesuit Historical Institute & St. Louis University.
- Kamma, Ch. F. 1972. *Koreri, The Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Katoppo, E. 1984. *Nuku: Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Laksono, P. M. 2004. "Pengantar: memotret wajah kita aendiri" dalam Roem Topatimasang. *Orang-Orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Lapian, A. B. 1994. "Bacan and the early history of North Maluku" dalam L. E. Visser ed. *Halmahera and Beyond, Social Science Research in the Moluccas*. Leiden: KITLV Press.
- Leirisa, R. Z. 1996. *Halmahera dan Raja Jailolo*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 2000. "The Bugis-Makassarese in the port towns; Ambon and Ternate through the nineteenth century" dalam *BKI, Authority and enterprise among the peoples of South Sulawesi*, 156, No: 3, hal. 621-4.
- Lombard, Dennys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya 2: Jaringan Asia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lucardie, G. R. E.. "The Makianese preliminary remarks on the anthropological study of migration oriented people in the Moluccas" dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra, No. III: Halmahera dan Raja Ampat*, Maret 1980.
- McCullagh, C. Behan. 2004. *The Logic of History, Putting Postmodernism in Perspective*. London: Routledge.
- Muhammad Adnan Amal & Irza Arnyta Djafaar. 2003. *Maluku Utara, Perjalanan Sejarah 1800-1950 Jilid 2*. Ternate: Universitas Khairun.
- Muridan S. Widjojo. *Cross-Cultural Alliance Making and Local Resistance in Maluku during the Revolt of Prince Nuku*. Disertasi Universiteit Leiden 2007.
- Needham, Rodney. 1984. "The transformation of prescriptive systems in eastern Indonesia" dalam P. E. de Josselin de Jong, ed. *Unity In Diversity*. Dordrecht/Cinnaminson: Forrish Publication.
- Nijland, D. J. 1994. "Film en non-verbale cultuuritingen bij de Tobelo" dalam Leontin E. Visser, ed. *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV.
- Nierop, A. H. van en E. Baak. *Naamlooze Vennotschappen*, Jaargang 1883,1884, 1887, 1888, 1889, 1891, 1903.
- Platenkamp, J. D. M. 1994. "The Tobelo of eastern Halmahera in the context of field of anthropological study" dalam P. E. de Josselin de Jong, ed. *Unity In Diversity*. Dordrecht/Cinnaminson: Forrish Publication.
- Plenders, C. L. M. 1984. *Bojonegoro 1900-1942, A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Singapore: Gunung Agung.
- Reid, Anthony. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Penerjemah: Sori Siregar, dkk. Jakarta: LP3ES.
- _____. May-2006. "Hybrid identities in the fifteenth-century Straits of Malacca" dalam *Asia Research Institute Working Paper Series*, No. 67, Asia Research Institute, National University of Singapore.

- Ricklefs, M. C. 2006. *Mystic Synthesis in Java, A History of Islamization from the Fourteenth to the early Nineteenth Centuries*. Connecticut: EastBridge.
- Rizzo, Sussana Grazia. "From paradise lost to promise land, christianity and the rise of Papuan nationalism". Disertasi University of Wollongong 2004.
- Rustam Hasyim. "Perdagangan di Karesidenan Ternate", 1854-1930. Tesis S-2 Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada 2006.
- Slamet Mulyana, 2005. *Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit*. Yogyakarta: LkiS.
- _____. Maret 2005. *Rintuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.
- Soedharmono, "Munculnya kelompok pengusaha batik di Laweyan pada awal abad XX", Tesis S-2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Soegijanto Padmo. 2002. *Tobacco Plantations and Their Impact on Peasant Society and Economy in Surakarta Residency*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahril Muhammad. 2004. *Kesultanan Ternate: Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Stibbe, D. G. 1939. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. s' Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Teljeur, Dirk. 1990. *The Symbolic System of Gimán of South Halmahera*. Dordrecht-Holland/Providence-USA: Forris Publications.
- _____. 1994. "Life cycle rituals among the Gimán of South Halmahera" dalam Leontin E. Visser. *Halmahera and Beyond*. Leiden: KITLV.
- Touwen, Jeroen. 2001, *Extremes in the Archipelago, Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942*. Leiden: KITLV.
- _____. "Regional inequalities in Indonesia in the late colonial period" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 3, No. 1. 2000.
- Timmer, Jaap. 2000. *Living with Intricate Futures Order and Confusion in Imyan Worlds, Irian Jaya, Indonesia*. Disertasi Katholieke Universiteit Nijmegen
- Valentijn, Françoise. 1724 *Beschryving der Moluccos, Eerste Deel*. Amsterdam: Dordrecht.
- Umehara, Hiromitsu, "Socio-economic structure of the rural Philippines: a case study of a hacienda Barrio in Central Luzon" dalam *The Developing Economies Journal*, Volume 7, September 1969.
- Verhoeve, C. L., ed. *The Makian Languages and Their Neighbours*. Canberra: Department of Linguistics Research School of Pacific Studies ANU.

- _____. "The non-Austronesian languages in the North Moluccas" dalam E. K. Masinambouw, ed. 1982. *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Visser, Leontin. "Man and plant" dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia No. III, Halmahera dan Raja Ampat*, Maret 1980
- _____. 1984. "Who are the Sahu and what do they belong to?" dalam P. E. de Josselin de Jong, ed. *Unity in Diversity*. Dordrecht/Cinnaminson: Forrisha Publication.
- _____. 1989. *My Rice is My Child, Social and Territorial Aspects of Swidden Cultivation in Sahu, Eastern Indonesia*, Translated by Rita DeCoursey. Dordrecht-Holland/Providence-USA: Forrisha Publications.
- Wall, V. I. van den. 1928. *De Nederlandsche Oudheden in de Molukken*, s' Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Watson, James L 1980.. "Slavery as an institution: open and closed systems" dalam James L. Watson, *Asian and African Systems of Slavery*. California: Basil Blackwell.
- Worcester, Donald E., and Wendell G. Schaeffer. 1956. *The Growth and Culture of Latin America*. New York: Oxford University Press.